

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DALAM PENGELOLAAN PABRIK ES DAN GUDANG IKAN DI PANGKALAN
PENDARATAN IKAN (PPI)
PUSONG KOTA LHOKSEUMAWE**

Lisa Iryani, S.Sos., M.A.P.¹⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Email : lisa.iryani@unimal.ac.id

ABSTRACT

The Pusong Fish Landing Base (PPI) of Lhokseumawe City is one of the main infrastructures in supporting capture fisheries business, namely the construction of an Ice Factory and fish warehouse in 2009 and completed in 2011 with Special Autonomy and DAK funds of around Rp. 2 billion more. The management of the Pusong Ice Factory was chaotic, so that later the impact of the arrears in the electricity bill was a power cut by PLN, so the factory stopped operating. This study aims to analyze and describe the responsibility of the Lhokseumawe City government in managing the Pusong fish landing base and the causes of the non-optimal management carried out by the Lhokseumawe City government. The methodology used in this study is a qualitative method through observation, interviews and documentation. In this study, it was found that the alleged weak analysis of the planning for the construction of the Lhokseumawe Pusong ice factory resulted in the provision of facilities and infrastructure at the ice factory being inadequate to produce ice blocks in large quantities and not in accordance with the standards for an ice factory. The lack of optimal elaboration of appropriate policies and the lack of qualified human resources in managing the ice factory at PPI Pusong Lhokseumawe.

Keywords: Responsibility, Local Government, Fish Landing Base (PPI)

ABSTRAK

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kota Lhokseumawe merupakan salah satu prasarana utama dalam menunjang usaha perikanan tangkap yaitu dengan di bangunnya Pabrik Es dan gudang ikan tahun 2009 dan rampung pada 2011 dengan dana Otsus dan DAK sekitar Rp 2 miliar lebih. Pengelolaan Pabrik Es Pusong tersebut kacau, sehingga kemudian berdampak menunggaknya tagihan listrik terjadi pemutusan arus oleh PLN, sehingga pabrik berhenti beroperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tanggung jawab pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengelola pangkalan pendaratan ikan Pusong dan penyebab belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ditemukan dugaan lemahnya analisis perencanaan pembangunan pabrik es pusong Lhokseumawe yang mengakibatkan penyediaan sarana dan prasarana di pabrik es tidak memadai untuk memproduksi es balok dalam jumlah besar dan tidak sesuai dengan standar untuk pabrik es. Belum optimalnya penjabaran kebijakan yang tepat serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola pabrik es di PPI Pusong Lhokseumawe.

Kata Kunci : *Responsibilitas, Pemerintah Daerah, Pengelolaan, Pangkalan Pendaratan Ikan*

PENDAHULUAN

Perikanan merupakan usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya ikan sebagai suatu kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lubis (2006) bahwa salah satu hal yang mendasari pengembangan perikanan adalah adanya potensi sumber daya ikan yang memungkinkan bisa dikembangkan tingkat kegiatan perikananannya. Manusia dalam memanfaatkan sumberdaya ikan membutuhkan modal, teknologi dan keterampilan. Sementara dalam memanfaatkan sumber daya ikan manusia membutuhkan perencanaan kegiatan penangkapan, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan pasca panen, pengolahan serta pemasaran (Nikijuluw, 2002).

Salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan perikanan adalah ketersediaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Tersedianya prasarana di PPI mempunyai arti yang sangat penting dalam usaha menunjang pengembangan perikanan sebagai basis perikanan tangkap. Hal tersebut dikarenakan PPI menjadi tempat pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian hasil tangkapan yang mana merupakan pusat kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran (Lubis, 2002).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kota Lhokseumawe merupakan salah satu prasarana utama dalam menunjang usaha perikanan tangkap. PPI Pusong Kota Lhokseumawe telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang. Di PPI tersebut di bangun Pabrik es dan gudang ikan untuk pengelolaan hasil tangkapan ikan oleh para nelayan dengan kapasitas produksi 30 ton per hari. Pabrik Es dan gudang ikan tersebut dibangun tahun 2009 dan rampung pada 2011 dengan dana Otsus dan DAK sekitar Rp 2 miliar lebih. Pemko Lhokseumawe kemudian memakai dana APBK 2011 Rp500 juta untuk pengadaan instalasi listrik pabrik es PPI Pusong tersebut. Pabrik es dan gudang ikan tersebut berfungsi pada tahun 2012.

Dengan tidak berfungsinya pabrik es dan gudang ikan tersebut, nelayan di Lhokseumawe terpaksa membeli es batangan dalam jumlah besar di Medan Sumatera Utara atau di Kabupaten Pidie, Aceh. Kepala Dinas Kelautan, Peikanan, dan Pertanian bapak Rizal mengakui kebutuhan es untuk nelayan di Lhokseumawe cukup banyak. Ia menyebutkan mencapai 10 ton per hari. Muhammad Zakaria, Salah seorang nelayan menyebutkan bahwa dirinya sangat kesulitan membeli es batangan dalam jumlah besar. Untuk Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Pusong terdapat

2.000 lebih nelayan. Kebutuhan es setiap hari di lokasi ini rata-rata di atas 150 batang. Tergantung hasil tangkapan ikan, kadang kala nelayan membutuhkan 200 batang lebih.

Jika pemerintah tidak mampu memfasilitasi dengan menghadirkan pengelola yang profesional, maka pabrik es dan gudang ikan tersebut tidak dapat memberi manfaat bagi para nelayan yang sangat membutuhkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya ikan diperlukan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang, tidak hanya bagi generasi saat ini namun juga bagi generasi masa depan. Dalam hal ini, pengelolaan yang bertanggung jawab menjadi salah satu kunci utama untuk menjawab tantangan pembangunan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries development*).

TINJAUAN PUSTAKA

Responsibilitas

Menurut Friedrich dalam Darwin (1997:14) responsibilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauh mana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah di atur. Responsibilitas mengukur tingkat partisipasi pemberi layanan melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan.

Pengelolaan Kegiatan Di Pelabuhan Perikanan

Pengelolaan kegiatan di pelabuhan perikanan dapat ditinjau dari 3 aspek (Lubis, 2006) :

1. Pengelolaan infrastruktur, suprastruktur dengan semua aktivitas penunjang, antara lain: investasi pelabuhan, penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, pajak, perbaikan dan pemeliharaan fasilitasnya seperti alur pelayaran, mercusuar dan jalan-jalan di lingkungan pelabuhan.
2. Kegiatan-kegiatan karena adanya kontak antara penjual dan pemakai (klien), terhadap kapal dan barang-barang/komoditi perikanan serta pemeliharaannya. Kontak ini secara eksplisit dapat berupa kegiatan-kegiatan ataupun jasa-jasa yang diberikan oleh pelabuhan.

3. Peraturan-peraturan kepelabuhanan antara lain peraturan-peraturan lokal, nasional maupun internasional dalam menentukan sirkulasi maritim, peraturan dalam hal perhitungan statistik, pencatatan keluar masuknya kapal, pencatatan dan pemeliharaan kesehatan awak kapal.

Selanjutnya dikatakan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan suatu pelabuhan perikanan antara lain, terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya, keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara staf pengelola pelabuhan antara lain kepala pelabuhan dan pegawainya, para pedagang, nelayan, pengolah dan buruh. Para pengguna tersebut harus dapat bekerja secara profesional, saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengoperasian dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Disamping itu pengguna-pengguna pelabuhan harus menguasai dan bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaannya masing-masing.

Keberhasilan dalam pengelolaan suatu pelabuhan antara lain banyak tergantung pada para pengguna yang ada di pelabuhan, misalnya terhadap kuantitas dan kualitas sumberdaya manusianya, keterkaitan dan keharmonisan hubungan antara staf pengelola pelabuhan antara lain kepala pelabuhan dan pegawainya, para pedagang, nelayan, pengolah dan buruh.

METODOLOGI PENELITIAN

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kota Lhokseumawe yang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan karena Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kota Lhokseumawe memiliki potensi yang besar di bidang perikanan. Masalah yang terjadi yaitu sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengelolaan ikan tidak memadai. Pabrik Es dan Gudang Ikan yang terdapat di Pusong Kota Lhokseumawe untuk pengolahan ikan sudah tidak dapat difungsikan lagi, bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai hingga berantakan, aset pabrik telah habis dijarah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan menunggaknya tagihan listrik pabrik tersebut hingga puluhan juta rupiah.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan atau kejadian melalui proses berfikir induktif dalam Suwandi (2008:1). Penelitian ini dikaji melalui metode deskriptif menganalisis serta menggambarkan sesungguhnya permasalahan yang diteliti dengan menggunakan kalimat sehingga penulis menemukan jawaban dari permasalahan yang terkait.

Informan Penelitian

Menurut Silalahi (2009:312), Informan adalah “orang yang diwawancarai, merupakan sumber informasi primer dan merupakan unsur penting dalam penelitian. Karena melalui informan akan diperoleh data primer sebagai bahan penting dalam penelitian ini. Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan Simple Random Sampling.

**Tabel
Informan**

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Fikri	Kasubbag Pembangunan Wali Kota Lhokseumawe	<i>Purposive</i>
2	Siti Asiah	Kabag Umum Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe.	<i>Purposive</i>
3	Asmadi, S.T	Kepala UPT. PPI Pusong Kota Lhokseumawe	<i>Purposive</i>
4	Muhammad	Pengelola Pabrik es PPI Pusong Kota Lhokseumawe	<i>Purposive</i>
5	Ismuhar	Sekretaris Desa Pusong Lama Kota Lhokseumawe	<i>Purposive</i>
6	Burhan	Nelayan Pusong Kota Lhokseumawe	<i>Random</i>
7	Nazaruddin	Nelayan Pusong Kota Lhokseumawe	<i>Random</i>
8	Zakaria	Nelayan Pusong Kota Lhokseumawe	<i>Random</i>

Sumber : Data olahan peneliti

Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Data primer, Data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

Pengamatan (Observation), Wawancara (Interview), Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Proses analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisa interaktif yang menurut Miles dan Huberman dalam Maleong (2005: 5), dapat ditempuh melalui 3 (tiga) tahapan pengumpulan data, yaitu:

1. Pengumpulan data,

2. Reduksi data
3. Penyajian data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pengelolaan pabrik es Pusong Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe mengeluarkan kebijakan bahwa pabrik es tersebut dilelang untuk dikelola oleh pihak kedua diluar pemerintahan. Pabrik es di PPI pusong dikelola oleh seorang Toke Nelayan sebagai pihak kedua yang diberikan hak oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian sebagai pengelola dengan menggunakan perjanjian antara kedua belah pihak. Dimana perjanjian tersebut berjalan untuk jangka waktu 5 tahun. Toke nelayan menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah Kota Lhokseumawe dan dinas terkait hingga akhirnya dipercaya untuk mengelola pabrik es pusong.

Penentuan pengelola pabrik es di PPI Pusong tidak didasarkan pada sumber daya manusia yang memiliki skill dan berkualitas. Pihak mana saja boleh mengelola pabrik es tersebut. Tidak adanya persyaratan untuk menjadi pengelola menyebabkan pabrik es di PPI Pusong dikelola oleh sumber daya manusia yang kurang memiliki skill dalam mengelola sebuah pabrik. Pengelola pabrik es pusong masih sangat minim akan pengetahuan tentang bagaimana mengelola sebuah pabrik dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masalah yang terjadi saat pengelolaan pabrik es, pihak pengelola hanya mampu menjalankan pabrik es pusong selama 3 bulan, padahal dalam perjanjian pengelola dapat mengoperasikan pabrik es untuk 5 tahun mendatang, mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017.

Salah satu penyebab pabrik tersebut tidak berjalan lagi karena pihak pengelola tidak sanggup untuk membayar listrik Pabrik es di PPI Pusong. Hal ini disebabkan karena pengeluaran dan pemasukan yang dihasilkan pabrik es tidak seimbang, sehingga tagihan listrik menunggak dan pihak pengelola tidak mampu lagi untuk membayar karena jumlahnya yang sangat besar.

Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Beberapa fasilitas menunjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendukung pengelolaan hasil tangkapan ikan yaitu adanya pembangunan pabrik es yang dibangun dikawasan pusong Lhokseumawe. Kehadiran cold storage di setiap titik distribusi amat

dibutuhkan untuk menjaga kesegaran ikan lebih lama sampai ke pembeli. Akan tetapi pengelolaan pabrik es pusong tersebut tidak dapat dikelola dengan baik karena masalah sarana.

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah dipabrik es memang tidak memadai, sarana untuk produksi es banyak yang tidak disediakan, bahkan listrik yang disediakan terlalu besar dari yang dibutuhkan pengelola untuk memproduksi es balok, sehingga pengelola harus membayar listrik tiap bulannya dengan jumlah yang cukup besar, hal ini sangat merugikan pengelola. Masih banyak alat produksi es yang tidak disediakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dan kelayakan mesin yang disediakan belum mencapai standar kelayakan sebuah pabrik es. Seharusnya pemerintah terkait yang membangun pabrik es menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan sesuai standar untuk pabrik es, sehingga orang yang akan mengelola pabrik es nantinya mudah memproduksi es dan tidak terkendala dengan buruknya peralatan yang ada dipabrik es.

Lemahnya evaluasi sarana dan prasaran kebutuhan pabrik es untuk para nelayan membuat pengelola pabrik mengalami kerugian dan tidak ada lagi pihak yang mengelola pabrik es tersebut. Buruknya penyediaan sarana dan prasarana dipabrik es membuat pengelola dan masyarakat sekitar sangat dirugikan karena tidak bisa mengelola dan memproduksi es balok. Pemerintah tidak menganalisis dan mengevaluasi tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk mengelola pabrik es tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar khususnya para nelayan. Padahal pabrik es tersebut sangat dibutuhkan oleh para nelayan yang jumlahnya cukup banyak di Pusong Kota Lhokseumawe.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan merupakan salah satu faktor rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi khususnya untuk daerah pusong Kota Lhokseumawe. Pengembangan infrastruktur secara lengkap akan memacu perkembangan pembangunan kelautan yang merupakan salah satu pintu keberhasilan pembangunan. Keterbatasan peralatan dan sarana fisik kelautan mengurangi keefektifan kegiatan pengelolaan kelautan. Pabrik es atau *Cold storage* sangat dibutuhkan terlebih lagi saat hasil tangkapan nelayan melimpah di tempat pelelangan. Hasil tangkapan ini tidak bisa dibawa seluruhnya untuk didistribusikan sehingga dibutuhkan ruang pendingin untuk menjaga kesegarannya lebih lama lagi.

Komitmen Pemerintah

Perikanan merupakan sumber mata pencaharian utama sebagian warga Pusong Kota Lhokseumawe. Hasil tangkapan ikan di kawasan pusong ini mencapai 4.208.728 kg pertahun. Tetapi, pendapatan nelayan setempat masih tetap rendah. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan es balok untuk mengawetkan ikan, sehingga nelayan terpaksa harus segera menjual hasil tangkapannya dengan harga yang relatif murah agar tidak membusuk. Keberadaan pabrik es balok diharapkan dapat mengatasi persoalan itu dan sekaligus akan memajukan bisnis perikanan setempat.

Bangunan pabrik es dan Gudang ikan di Pusong lama Kota Lhokseumawe tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah, bangunan tersebut rusak dan asetnya banyak yang dijarah karena sudah lama tidak difungsikan dan pemerintah tidak melakukan pembenahan terhadap pabrik yang menghabiskan dana 2 milyar rupiah tersebut. Kondisi Pabrik es di Pusong sudah banyak yang rusak, sehingga Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dinas terkait lebih memilih membangun pabrik es di daerah lain, karena jika pabrik es pusong di perbaiki maka anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sama dengan membangun pabrik es yang baru. Pengelolaan yang buruk membuat pembangunan pabrik es di Pusong menjadi proyek yang mubazir, bangunan ini hanya digunakan dalam jangka waktu 3 bulan, dan setelah itu tidak dikelola dan tidak difungsikan kembali oleh pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pabrik es di Pusong akan dirombak dan akan dijadikan gudang. Gudang peralatan kebutuhan nelayan dan PPI Pusong. Pabrik es pusong akan alihkan fungsi setelah selesai pabrik yang baru nanti. Pembangunan pabrik es hanya sia-sia dan menjadi pemborosan anggaran daerah karena bangunan tersebut tidak dimanfaatkan secara baik. Pembangunan pabrik es yang baru jika tidak dikelola oleh pihak yang profesional maka akan mengalami hal yang sama seperti pabrik es di PPI Pusong Lhokseumawe.

Pemerintah Kota Lhokseumawe, Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian, Pihak pengelola dan masyarakat setempat tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga dan mengelola pabrik es di Pusong, hal ini terlihat dari bangunan yang semakin rusak, aset yang habis dijarah serta tidak ada pemeliharaan terhadap pabrik tersebut. tidak terjalannya kerja sama yang baik antar semua pihak dalam pemeliharaan pabrik es pusong.

Penerima manfaat langsung dari pembangunan pabrik es ini adalah nelayan, pedagang ikan dan pengusaha industri pengolahan ikan yang beraktivitas khusus di PPI Pusong dan kawasan sekitarnya. Untuk mencegah kemungkinan tidak berlanjutnya pabrik es ini, pelaksana Program mempertimbangkan hal-hal berikut seperti lokasi pabrik yang dekat dengan konsumen dan tersedia kendaraan pengangkut es; proses konstruksi diawasi ketat untuk memastikan peralatan sesuai standar, operasional pabrik es diserahkan kepada perusahaan swasta dipilih melalui pelelangan terbuka yang memiliki kinerja baik dan berpengalaman dalam mengelola pabrik sejenis. Komitmen dan kelancaran dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhadap suatu pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan perikanan.

Kendala Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Memfungsikan Dan Mengelola Pabrik Es Dan Gudang Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kota Lhokseumawe.

Kendala Internal

Pabrik es adalah suatu unit produksi untuk membuat dan menghasilkan es dalam bentuk es balok ataupun flake ice sebagai bahan pembantu untuk mendinginkan hasil perikanan dalam rangka mempertahankan mutu ikan. Bangunan pabrik terdiri instalasi unit refrigerasi atau unit pendingin dimana dalam unit ini terjadi proses pendinginan/pembekuan bahan baku air menjadi es. Adapun komponen yang di instal ini antara lain adalah compressor, condensor, receiver, evaporator (verdampfer), brine tank (bak air garam), suction trap, accumulator, oil separator, agitator, control valve dan instalasi listrik sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan unit pendingin tersebut. Apabila komponen tersebut tidak ada maka es tidak dapat diproduksi, kelengkapan komponen dari pabrik es sangat dibutuhkan untuk kelancaran produksi es dan bisa semakin meningkat.

Kondisi tersebut tidak terjadi di pabrik es pusong Kota Lhokseumawe. Beberapa masalah yang menyebabkan pabrik es tidak berfungsi yaitu tidak lengkapnya sarana untuk memproduksi es batang di pabrik es dan besarnya biaya sewa bangunan pabrik es yang disewakan 100 juta pertahun. Hal ini membuat pihak pengelola tidak mampu lagi untuk mengelola pabrik es, hingga saat ini tidak ada pihak yang berniat untuk mengelolanya. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak lengkap untuk menunjang produksi es batang belum memadai di pabrik es pusong, sedangkan untuk memproduksi es batang yang banyak perlu didukung dengan sarana yang lengkap. Selain itu biaya sewa bangunan yang cukup tinggi membuat pihak manapun tidak ada yang ingin mengelola pabrik es pusong.

Selain itu biaya tagihan listrik dan pemasukan yang pabrik es yang didapatkan tidak mampu menutupi tagihan listrik yang tinggi, Tunggakan tagihan listrik yang berjumlah besar membuat pihak

pengelola tidak mampu membayar tagihan tersebut. Pihak PLN memutuskan aliran listrik ke Pabrik es Pusong, dengan tidak adanya aliran listrik maka mesin produksi es tidak dapat bekerja. Pihak pengelola juga harus membagi

Permasalahan yang terjadi di pabrik es pusong disebabkan perencanaan pembangunan yang dilakukan tanpa analisis yang baik terlebih dahulu, sehingga penyediaan kelengkapan alat pabrik tidak lengkap sehingga tidak mampu produksi es dalam jumlah banyak. Prosedur pengelolaan pabrik es pusong belum dijalankan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari penyebab bangkrutnya pabrik es PPI adalah tidak tertutupnya biaya operasional. Seharusnya program pemerintah daerah dalam segi pembangunan agar selalu melihat kondisi di lapangan kebutuhan apa yang dibutuhkan para nelayan.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal (*external constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Kendala eksternal yang berupa volume produk yang dapat dijual, dapat diatasi dengan menemukan pasar, meningkatkan permintaan pasar ataupun dengan mengembangkan produk baru. Teori kendala mengakui adanya kendala-kendala yang dapat membatasi kinerja perusahaan. Teori ini mengembangkan pendekatan spesifik guna mengelola kendala guna mendukung tujuan perbaikan berkelanjutan. Menurut teori kendala jika hendak memperbaiki kinerja maka kita harus mampu mengidentifikasi kendala, mengeksploitasi kendala dalam jangka pendek serta menemukan solusi untuk kendala jangka panjang.

Tujuan pembangunan pabrik es balok di PPI Pusing Lhokseumawe adalah untuk memenuhi kebutuhan es bagi nelayan dan pedagang ikan di daerah itu dan wilayah sekitar. Selama ini, kebutuhan es balok dipasok dari Sigli dengan harga relatif mahal. Terkadang pasokan es balok tidak mencukupi bila hasil tangkapan nelayan melimpah. Dengan adanya pabrik es balok itu, tentu harganya bisa ditekan sehingga pendapatan nelayan setempat meningkat. Akan tetapi dalam pengelolaan pabrik es tersebut mengalami beberapa kendala sehingga tidak dapat difungsikan lagi. Kendala yang terjadi yaitu pihak pengelola yang kurang profesional dan tidak fokus dalam pengelolaan pabrik es pusong. Pengelolanya berasal dari warga pusong sendiri. Sumber daya manusia yang tidak profesional membuat pabrik es di PPI Pusong Lhokseumawe tidak berjalan lagi.

Kurangnya pelatihan dari pemerintah Kota Lhokseumawe dalam bidang manajemen, kepemimpinan dan berbagai pelatihan lain kepada pengelola, koperasi nelayan dan pedagang ikan membuat kemampuan mereka terbatas dalam hal mengelola pabrik es dan ikan di PPI Pusong Lhokseumawe. Mereka belum terlalu memahami bagaimana manajemen yang baik dalam pengelolaan pabrik es dan ikan di Pusong. pelatihan yang diberikan hanya kepada nelayan saja, dan itu sangat jarang dilakukan, hanya sekedar sosialisasi kepada nelayan tentang pengembangan ikan.

Keamanan yang tidak terjamin di Pusong membuat pihak terkait sulit untuk mengelola kembali pabrik es tersebut, karena sebagian besar aset di dalam pabrik es sudah banyak dijarah oleh masyarakat pusong sendiri, tidak ada kesadaran masing-masing pihak untuk menjaga aset bangunan pabrik es. Keamanan menjadi sangat penting untuk sebuah bangunan yang memiliki peran dan aset penting didalamnya. Masalah keamanan dinilai tidak menjadi aspek yang terlalu penting karena pabrik tersebut tidak beroperasi setiap hari, dan bahkan sudah lama tidak ada yang menjalankannya.

KESIMPULAN

1. **Responsibilitas pemerintah Kota Lhokseumawe dalam dalam pengelolaan pabrik es dan gudang ikan di pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pusong Kota Lhokseumawe dalam menentukan sumber daya manusia sebagai pengelola pabrik es Pusong dan gudang di Pusong Kota Lhokseumawe belum dilakukan secara efektif. Lemahnya analisis perencanaan pembangunan pabrik es pusong Lhokseumawe yang mengakibatkan penyediaan sarana dan prasarana di pabrik es tidak memadai untuk memproduksi es balok dalam jumlah besar dan tidak sesuai dengan standar untuk pabrik es. Belum optimalnya penjabaran kebijakan yang tepat, strategi dan program pembangunan daerah pesisir dengan memanfaatkan nilai strategis PPI. Masih timbul kesan bahwa PPI merupakan domain daerah pusong semata, ini terlihat dari ketidakpedulian pemerintah untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada dipabrik es pusong. Rendahnya komitmen pemerintah Kota Lhokseumawe dan kerja sama antara pihak yang terkait dalam memelihara dan mengelola menyebabkan pabrik es dan gudang ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong pada akhirnya menjadi proyek pembangunan yang terbengkalai.**
2. **Penyebab Pemerintah Kota Lhokseumawe belum optimal dalam mengelola pabrik es dan gudang ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong Kota Lhokseumawe karena kendala internal : Keterbatasan sarana dan prasarana atau kelengkapan komponen dari pabrik es yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran produksi es dan bisa semakin meningkat. Selain itu Perekrutan pengelola tenaga kerja dipabrik es tidak dilakukan secara transparan dan tanpa persyaratan untuk memenuhi kualifikasi yang layak untuk menjadi pengelola. Selain itu adanya kendala eksternal : Kualitas sumber daya manusia yang kurang profesional dan tidak memiliki skill sesuai di bidang tersebut.**

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2005. Master Plan dan Rencana Strategis Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Dwiyanto, Agus. 2014. Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan publik .Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2002. Metodologi Penelitian. Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta.
- Lubis E. 2006. Buku 1 : Pengantar Pelabuhan Perikanan. bagian Pelabuhan Perikanan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor : Bogor.
- L.Cooper, Terry . 1998 . The Responsible Administrator : an approach to ethics for the administrative role. United State : Jossey Bay.
- Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Monintja DR. 2001. Pelatihan untuk pelatih pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Prosiding Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB. Bogor.
- Moleong (1998), Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2009. Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Rochimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta : LP3ES
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian, Bandung: Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Universitas Diponegoro Semarang.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI
- Tridjoko. (2005). Evaluasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tasik Agung Dalam Upaya Penataan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Rembang. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat
- Wahab, Abdul. 2001. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo.